

PEMBERDAYAAN MANTAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP) DI DESA LIPURSARI, KECAMATAN LEKSONO, KABUPATEN WONOSOBO

Arifiartiningsih

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Alamat Email: arifiartiningsih@gmail.com

Abstract

Buruh Migran Perempuan (BMP/women migrant workers) are national foreign exchange hero for Indonesia. However, after returning home, ex-BMPs are usually unable to face social and economic realities. Therefore, they need an organisation to develop and empower their potential. This research aims to explain how community intervention empower ex-Buruh Migran Perempuan (BMP/women migrant worker) in Lipursari Village, Sub-district Leksono of Wonosobo District, Central Java. By means of community, this research refers to NGO, local organisation, and government agencies. This study collected data by using observation, interview and archival documents. Primary data were from ex-BMP's interview who actively engage in MUIWO, while secondary data were from interview with community leaders and Lipursari Village's official documents. Data were then analysed by using Rothman's theory of community intervention to understand patterns and categories of ex-BMP's empowerment. This research finds community intervention's empowerment affect positively for ex-MBPs through three approaches, namely local society empowerment, social plan, and social action. Economic and social empowerment involves several parties, such as individual, groups/community (i.e. Migrant Care, SARI, MUIWO and ISTANA RUMBIA), and government agencies. Economic empowerment includes trainings (i.e. sewing, bridal make up, embroider, and snacks) and setting up business plan. Social empowerments includes advocacy and mentoring ex-BMPs for capacity building and self development.

Key words: *Women Migrant Workers, Economic Empowerment and Community Intervention*

Intisari

Buruh Migran Perempuan (BMP) merupakan salah satu kelompok yang disebut pahlawan devisa. Persoalannya, setelah kembali ke Indonesia mantan BMP seringkali diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan (marginal). Hal ini dikarenakan ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi tantangan dan realita kehidupan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, mantan BMP memerlukan wadah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan bagaimana bentuk pemberdayaan yang diperoleh mantan BMP melalui intervensi komunitas baik dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal, ataupun pemerintah. Penelitian yang dilakukan di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan mantan BMP yang aktif dalam organisasi MUIWO. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan penelusuran dokumentasi di Desa Lipursari. Data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori intervensi komunitas Rothman untuk menemukan pola dan kategori pemberdayaan yang diperuntukkan bagi mantan BMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui intervensi komunitas memberikan dampak positif bagi mantan BMP. Pemberdayaan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Dari tiga pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang terjadi meliputi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang melibatkan individu untuk individu, komunitas untuk individu dan komunitas untuk kelompok. Pada proses pemberdayaan, untuk mencapai tujuan dibutuhkan sinergi antara mantan BMP, komunitas/organisasi (*Migrant Care*, SARI, MUIWO dan Istana Rumbia) serta pemerintah yang meliputi dinas terkait dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi yang diterima berupa rencana usaha dan berbagai pelatihan (kursus menjahit, tata rias pengantin, salon, bordir dan pembuatan makanan kecil). Pemberdayaan sosial diperoleh BMP berupa advokasi dan pengembangan diri mantan BMP.

Kata Kunci : Buruh Migran Perempuan (BMP), Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan Sosial, Interaksi Komunitas

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan isu yang tidak bisa terlepas dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan sebagai obyek pemberdayaan merupakan fenomena yang dapat dikaji dari berbagai sudut pandang.¹ Ukuran dan pengertian kemiskinan bersifat relatif tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.² Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan, sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).³

Kemiskinan dalam islam dinilai sebagai cobaan dan bencana yang hanya dapat dihindari dengan pertolongan Allah.⁴ Kemiskinan sebagai realitas kehidupan selalu digambarkan dengan suatu keadaan hidup yang kekurangan, lemah, dan tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dari segi material maupun spiritual. Pada kenyataannya kemiskinan merupakan kondisi yang tidak dapat dihilangkan secara mutlak, tetapi hanya bisa diatasi dan diperbaiki kualitasnya.⁵

Yusuf Al Qardawi menyebutkan ada beberapa konsepsi islam dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut pandangan islam, beberapa jalan dalam mengatasi kemiskinan dapat ditempuh dengan cara bekerja, mencukupi keluarga yang lemah, serta zakat.⁶ Seperti firman Allah dalam Q.S. At Taubah Ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

1 Goenawan Wybisana, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, artikel dari Seputar Indonesia 26 April 2009, (<http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=3639>, diakses pada 15 Mei 2015).

2 Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm.1.

3 *Ibid.*, hlm. 4.

4 Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 11.

5 Musa Asy'arie, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 26.

6 Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 52.

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-Taubah: 105).⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa bekerja merupakan senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia.⁸ Akan tetapi perlu diketahui bahwa yang menjadi penilaian bukanlah hasil dari pekerjaan yang berupa akumulasi harta kekayaan, tetapi proses pencapaian hasil berupa aktifitas kerja. Sedangkan hasilnya, ditentukan berdasarkan tepat tidaknya jalan yang ditempuh. Hal itu akan berpengaruh terhadap perluasan dan penyempitan rezeki yang diperoleh.⁹ Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa islam memberikan spirit dan pemikiran-pemikiran praktis untuk mendorong manusia bergerak, berusaha, dan bekerja. Hal tersebut sangat relevan untuk mengatasi meluasnya kemiskinan. Salah satu langkahnya adalah dengan adanya pemberdayaan yang berkelanjutan melalui pelatihan dan penanaman jiwa wirausaha dalam masyarakat.¹⁰

Negara berkembang memiliki penduduk miskin yang lebih dari separuhnya merupakan perempuan. Fenomena miskinnya perempuan dibanding laki-laki dalam kelompok miskin bukanlah hal baru. Prosentase kemiskinan senantiasa berkorelasi positif dengan prosentase perempuan miskin. Hal ini menunjukkan sebuah kenyataan bahwa sebagian angka kemiskinan diisi oleh kaum perempuan. Dalam kondisi demikian, perempuan justru hadir sebagai katup penyelamat ekonomi keluarga. Perempuan lebih banyak mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi gizi keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan keluarga dibanding laki-laki.¹¹

Perempuan menjadi sebuah objek yang urgent dikaji ketika nampak jelas bagaimana pentingnya sebuah pekerjaan bagi mereka. Di desa, perempuan berduyun-duyun melakukan berbagai cara untuk

7 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special For Women*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2005), hlm. 203.

8 Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996, hlm. 52.

9 Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 50.

10 Musa Asy'arie, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 138.

11 Tyas Retno Wulan, *Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*, (Bogor: Desertasi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor, 2010).

memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus mengalami ekspansi. Salah satu strategi perempuan desa untuk meyelamatkan ekonomi keluarga adalah melakukan migrasi internasional.¹²

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah penduduk sebanyak 754.698 jiwa yang terdiri dari 383.232 laki-laki dan 371.466 perempuan.¹³ Sepanjang 2010 hingga 2013 Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan prosentase penduduk miskin yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat 33 dari 35 se-Jawa Tengah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa besar prosentase penduduk kategori miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil dan mengurangi tingkat kemiskinan.¹⁴

Kemiskinan dapat dikurangi dengan berbagai cara. Salah satu cara mengurangi kemiskinan adalah perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, diperlukan data ketenagakerjaan untuk melihat beberapa aspek yang terkait dengan hal tersebut. Menurut data, penduduk usia kerja di Kabupaten Wonosobo 69,50% adalah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan 30,50% diantaranya merupakan penduduk bukan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk sekolah dan mengurus rumah tangga.¹⁵ Permasalahan yang muncul pada bidang ketenagakerjaan adalah tingginya tingkat pengangguran dan minimnya peluang/kesempatan kerja. Aksesibilitas pada berbagai sektor lapangan kerja yang rendah menjadikan masyarakat memilih untuk mengadu nasib dengan menjadi Buruh Migran Internasional.

Angka perempuan sebagai angkatan kerja antar negara lebih besar dibanding dengan laki-laki. Sektor lapangan kerja yang tersedia pada migrasi internasional sebagian besar merupakan sektor informal atau pekerja rumah tangga.¹⁶ Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, jumlah penempatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Wonosobo pada tahun 2013 sebanyak 1.619 orang.

12 *Ibid.*, hlm. 1.

13 Data Biro Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2014.

14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016: BAPPEDA Wonosobo 2015.

15 Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo tahun 2014.

16 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2014 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pekerja asal Wonosobo rata-rata bekerja di Kawasan Asia Pasifik. Pekerja di Singapura tercatat sebanyak 579 orang, Taiwan 456, Hong Kong 280, Malaysia 186, Korea 29, Abu Dhabi 17, dan Jepang 5 orang.¹⁷

Pada Tahun 2011, TKI asal Wonosobo yang pulang ke Indonesia Sebanyak 721 orang dengan jumlah TKI bermasalah sebanyak 166 orang, tahun 2012 sebanyak 511 orang dengan 89 diantaranya bermasalah, dan tahun 2013 tercatat 61 orang dan 9 diantaranya bermasalah. Banyaknya kasus TKI bermasalah yang terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesiapan mental, kemampuan/*skill*, hingga kelengkapan dokumen. Permasalahan yang muncul antara lain seperti gaji tidak dibayar, hilang kontak, kecelakaan kerja, kematian, pelecehan seksual, pemerasan, penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, permasalahan hukum, hingga deportasi.¹⁸

Desa merupakan suatu wilayah yang menjadi kantong pengirim tenaga kerja ke luar negeri, 6,5 juta tenaga kerja yang berada di luar negeri berasal dari desa.¹⁹ Dalam konsep kehidupan pedesaan, migrasi dipandang sebagai salah satu bentuk strategi penghidupan masyarakat pedesaan.²⁰ TKI yang kembali ke Wonosobo memiliki kondisi yang beragam. Hal ini dikarenakan perlakuan yang didapat di luar negeri kerap kali menyisakan cedera psikis. Oleh karena itu, mantan TKI memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari lembaga tertentu, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat agar menumbuhkan kembali keinginan untuk bangkit dan berdaya.²¹

Desa secara umum disebut sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil serta identik dengan pertanian,²² begitu juga Desa Lipursari. Pada awalnya, mayoritas

17 Dapat dilihat di Harian Suara Merdeka tanggal 3 April 2014, berita yang ditulis oleh S. Djatmiko Hadi dengan judul *Potret TKI dari Wonosobo* menyebutkan data-data mengenai TKI asal Wonosobo baik dari jumlah maupun keadaan TKI di luar negeri dan ketika telah kembali, (<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/03/257572/Potret-TKI-dari-Wonosobo>, diakses pada 26 Januari 2015).

18 Salma Safitri, dkk, *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia: Catatan Penanganan Buruh Migran Perempuan Pekerja rumah tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan 2005-2009*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2010).

19 Data dari Harian Suara Merdeka 20 Januari 2015, *Lindungi TKI Perlu Dimulai dari Desa*, (<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lindungi-tki-perlu-dimulai-dari-desa/>, diakses pada 09 Maret 2015).

20 Ratih Dewayanti, *Penguasaan Tanah, Migrasi Internasional, dan Perubahan Pedesaan*, Jurnal Analisis Sosial Vol. 15 No. 2, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2010), hlm. 67.

21 Data dari Rmol 18 Januari 2013, *Pemerintah Patut Berdayakan Hasrat Ingin Berubah dari TKI*, (<http://www.rmol.co/read/2013/01/18/94595/Pemerintah-Patut-Berdayakan-Hasrat-Ingin-Berubah-dari-TKI->, diakses pada 09 Maret 2013).

22 Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 9.

masyarakat Lipursari bekerja sebagai petani.²³ Pada perkembangannya, dengan motivasi perbaikan perekonomian masyarakat bekerja sebagai buruh migran yang tersebar di Asia Pasifik seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Brunei Darussalam, Korea, hingga Makau. Menurut data, 115 orang warga Lipursari tercatat sebagai BMP (Buruh Migran Perempuan), 50 berada di luar negeri dan 65 sudah kembali ke kampung halaman.²⁴

Di Desa Lipursari, BMP yang telah kembali tidak mempunyai aktifitas yang produktif, sebagian besar dari mantan BMP merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Minimnya pelatihan dan pemberdayaan menjadikan mereka melakukan pekerjaan sampingan yang tidak tetap, seperti berjualan makanan kecil, membuat kerajinan, hingga mencoba peruntungan wirausaha.²⁵

Seiring berjalannya waktu, pemberdayaan dilakukan dengan bantuan berbagai organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Bantuan berupa pemberdayaan melalui berbagai pelatihan diadakan oleh *Migrant Care* dan pemerintah melalui BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan beberapa dinas di Kabupaten Wonosobo. Pelatihan yang dilaksanakan berupa pelatihan seperti menjahit, batik, dan pembuatan manisan buah. Selain itu, ada pula komunitas yang beranggotakan mantan buruh migran yaitu MUIWO (*Migrant United Indonesia Wonosobo*) dan TBM (Taman baca masyarakat) Istana Rumbia yang turut dalam usaha pemberdayaan masyarakat dengan melalui beberapa kegiatan pelatihan.²⁶

Dari uraian latar belakang tersebut, salah satu hal yang menarik untuk dijadikan fokus penelitian adalah bagaimana bentuk pemberdayaan yang diperoleh mantan BMP baik itu dari lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Kondisi psikis yang tidak stabil seringkali menjadi beban tersendiri bagi mantan buruh migran, sehingga mereka kesulitan untuk bangkit dari kondisi yang mereka alami. Dalam beberapa kasus BMP sering mengalami ketidakadilan yang berlapis. Ketidakadilan tersebut beruntun mulai dari sebelum berangkat, ketika berada di negara tujuan, hingga sampai kepulangan kembali ke daerah asal. Dari kegelisahan akademik tersebut, penelitian ini menggali bagaimana bentuk pemberdayaan mantan buruh migran perempuan (BMP) melalui swadaya masyarakat dan pemerintah di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Bertujuan

23 Observasi di Desa Lipursari pada Kamis pukul 13:50

24 *Ibid.*, pukul 15:04.

25 *Ibid.*, pukul 13:50.

26 *Ibid.*, pukul 13.50.

untuk menguraikan bentuk-bentuk pemberdayaan mantan BMP di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan teknik penelitian dengan mencari data-data langsung di lapangan untuk mengetahui secara jelas dan valid bagaimana bentuk pemberdayaan mantan BMP (Buruh Migran Perempuan) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan, dan menguraikan sesuatu apa adanya berdasarkan bukti dan fakta sosial yang ada. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Desa tersebut dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan menjadi sebuah wilayah yang merupakan salah satu kantong penyalur buruh migran di Wonosobo dengan sebagian besar perempuan merupakan mantan BMP internasional.²⁷

Migrasi Internasional di Desa Lipursari

Feminisasi migrasi atau dominasi perempuan sebagai buruh migran berakar dari daerah yang disebut sebagai kantong penyalur. Daerah tersebut secara masif mengirimkan buruh perempuan dalam skala tertentu. Fenomena migrasi baik dalam lingkup internal ke kota-kota besar maupun eksternal ke luar negeri sebagian besar didominasi oleh perempuan daerah/desa,²⁸ begitu juga di Kabupaten Wonosobo. Buruh migran perempuan dari Kabupaten Wonosobo memiliki jumlah lebih besar daripada buruh migran laki-laki. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo menunjukkan, pada tahun 2013 total jumlah buruh migran sebanyak 1619. Dari jumlah tersebut 1498 diantaranya merupakan buruh migran perempuan yang berasal dari desa.

Di Desa Lipursari, fenomena migrasi internasional mulai terjadi pada tahun 1980-1990an.²⁹ Kesempatan kerja di daerah yang semakin sempit dan kebutuhan ekonomi yang mendesak menyebabkan masyarakat melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai buruh migran.³⁰ Pengiriman buruh migran didominasi oleh perempuan

27 Observasi lapangan pada Kamis 13 November 2014

28 Agus Joko Pitoyo, *Buruh Migran di Luar Negeri: Perempuan-perempuan Perkasa*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2004).

29 Wawancara SL, seorang mantan BMP Singapura, Hong Kong, dan Macau. Wawancara dilakukan di Desa Lipursari pada Minggu, 19 April 2015 pukul 12:50.

30 Ana Sabhana Azmi, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah*

yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT), *baby sitter*, dan perawat manusia lanjut usia (manula).³¹ Banyaknya perempuan yang bekerja sebagai buruh migran di Desa Lipursari, tidak terlepas dari peristiwa *green revolution* atau revolusi hijau di pedesaan. Salah satu akibat dari peristiwa tersebut adalah adanya feminisasi kemiskinan. Perempuan tidak lagi terserap dalam ranah sosial pedesaan, sehingga pada saat itu migrasi dari pedesaan sangat intensif, baik secara mandiri (urbanisasi) maupun program pemerintah (koloni baru atau transmigrasi).³² Arus migrasi BMP di Desa Lipursari adalah ke Asia Pasifik. Pemilihan negara tujuan oleh BMP didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut meliputi letak geografis yang tidak terlalu jauh, keinginan pribadi dari BMP, upah yang lebih tinggi, contoh/mengikuti BMP sebelumnya, beban kerja yang tidak terlalu berat, dan kebudayaan di negara tujuan.

BMP yang berasal dari Desa Lipursari merupakan purna Asia. 7 dari 13 informan merupakan BMP yang pernah ke Singapura, sedangkan 5 diantaranya pernah ke Taiwan dan Hong Kong. Singapura sebenarnya bukanlah primadona negara tujuan, begitu pula Malaysia. Akan tetapi, ada salah satu prosedur dari agensi penyalur tenaga kerja yang mengharuskan BMP pergi ke satu negara tertentu sebelum ke negara lain.

*Awalnya saya memilih ke Hong Kong tapi karena PT katanya kalau belum eks belum pernah ke luar negeri nggak boleh ke Hong Kong dulu, yasudah saya ke Singapura. Kalau nggak ke Malaysia kan ke Singapura, dan di Singapura kan gajinya lebih tinggi dari Malaysia. Sebenarnya kalau Singapura kan tertekan banget soalnya nggak ada off day, biasanya kalau Minggu kan ada, kalau Minggu tanggal merah kan ada. Kalau Singapura enggak, tapi peraturan sekarang sudah beda lagi, sudah ada off daynya.*³³

Motivasi BMP di Desa Lipursari

Kepergian BMP ke luar negeri sebagian besar memiliki tujuan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam hidup. Selain faktor internal yang dimiliki BMP, mereka juga memenuhi

Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010, hlm.2.

31 Wawancara dengan semua informan menunjukkan bahwa pekerjaan BMP dari Desa Lipursari ketika berada di luar negeri adalah pekerja sektor informal seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan menjaga orang tua.

32 Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia, *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*, (Jakarta: Solidaritas Perempuan, TT), hlm. 50.

33 Wawancara KY di Desa Lipursari, pada Minggu, 19 April 2015 pukul 13:50.

kepentingan orang di luar dirinya. Orang-orang tersebut antara lain adalah suami, anak, orang tua, bahkan keluarga. BMP yang pergi ke luar negeri atas kemauan dan kepentingan sendiri merupakan BMP yang belum membangun keluarga sehingga masih berorientasi mencari pengalaman. Beberapa tujuan yang disebutkan BMP antara lain: membangun rumah, menyekolahkan anak atau adik, melunasi hutang suami, serta menabung untuk masa depan keluarga (investasi melalui tanah dan modal usaha).

BMP di Desa Lipursari memiliki motivasi bekerja di luar negeri sebagai berikut: memperbaiki ekonomi keluarga (merubah nasib), melunasi hutang, menyekolahkan anak, mencari penghasilan yang lebih besar, faktor ekonomi (mencari pengalaman), memperbaiki perekonomian, keinginan sendiri, mencari pengalaman, keinginan sendiri, keinginan dan memenuhi kebutuhan keluarga, keinginan pribadi karena keluarga ada yang menjadi BMP, merubah nasib, ekonomi dan keterpaksaan, memperbaiki ekonomi keluarga.³⁴

Berdasarkan pendapat dari informan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan BMP bekerja di luar negeri. Sebagian besar BMP menyatakan bahwa mereka memiliki motivasi memperbaiki perekonomian keluarga. Perbaikan ekonomi diiringi oleh kebutuhan-kebutuhan krusial lain seperti pendidikan dan pelunasan hutang. Selain itu ada beberapa BMP yang tertarik karena keinginan mencari pengalaman dan melihat contoh orang lain.

Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa BMP memiliki tujuan dari keputusan yang mereka ambil. Tujuan tersebut berupa kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam mencapai tujuan, BMP tentu memerlukan kekuatan dan tekad yang disebut sebagai motivasi. Motivasi disebut sebagai suatu kumpulan kekuatan/tenaga yang berasal dari dalam dan luar individu. Kekuatan tersebut dapat memunculkan sikap dan menetapkan bentuk, arah, serta intensitas.³⁵ Motivasi juga menggambarkan suatu kekuatan yang menggerakkan manusia untuk bersikap dengan cara tertentu. Hal ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan dasar (fisiologis), kebutuhan akan harga diri (psikologis), dan kebutuhan berinteraksi sosial (sosiologis).³⁶ Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan BMP merupakan hasil dari dorongan motivasi. Dalam prosesnya, pencapaian tujuan melalui

34 Data Primer dari beberapa informan

35 Usmara, *Motivasi Kerja: Proses, Teori, dan Praktik*, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), hlm. 14.

36 *Ibid.*, hlm. 15.

beberapa tahapan yang harus ditempuh.

Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang mereka perjuangkan untuk dipenuhi. Kebutuhan itu sendiri bersifat kompleks dan terus-menerus berubah.³⁷ Gambar diatas menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan, BMP harus melalui beberapa tahapan. BMP harus mencari tujuan yang jelas, hal ini diperlukan agar orientasi yang telah mereka bangun tidak bergeser pada tujuan yang lain. Setelah memiliki tujuan yang jelas, mereka harus paham bahwa tujuan tersebut akan mengantarkan mereka pada pemenuhan kebutuhan. Pemahaman berlanjut menjadi sebuah usaha yang mereka ambil yaitu dengan bekerja di luar negeri, hingga akhirnya mereka dapat mencapai tujuan berupa pemenuhan kebutuhan.

Mekanisme Keberangkatan BMP di Desa Lipursari

Catless dan Miller mengatakan bahwa globalisasi telah melahirkan industri migrasi. Industri migrasi internasional mempengaruhi kebijakan negara dan melibatkan begitu banyak aktor di dalamnya. Mereka menjadi agen-agen penting dalam mengorganisir keberlangsungan migrasi itu sendiri. Agen-agen tersebut meliputi perekrut tenaga kerja, para calo, biro perjalanan, penterjemah dan agen perumahan.³⁸

Hampir semua BMP menggunakan jasa calo/penyalur tenaga kerja untuk berangkat ke luar negeri. Pada awalnya, BMP menggunakan jasa calo/sponsor lokal penyalur tenaga kerja. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan mengenai mekanisme dan proses pengurusan dokumen yang diperlukan. Mekanisme penyaluran tenaga kerja memang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Selain sebagai akibat prosedur rekrutmen yang kurang optimal, berbagai kemungkinan tindak kejahatan yang bisa dialami BMP merupakan dampak dari kecacatan legalitas hukum, seperti legal tidaknya status buruh migran di luar negeri dan ada tidaknya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara penerima. Hal ini menjadi penting karena dengan legalitas dan peraturan yang jelas, BMP dapat didistribusikan dan sampai di negara tujuan dengan nasib yang jelas.

Kondisi BMP di Luar negeri

BMP yang telah ditempatkan di satu negara seolah-olah sudah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁸ Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, hlm. 229.

dilepaskan begitu saja. Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengupayakan perlindungan secara maksimal terhadap BMP di luar negeri, terutama pada negara-negara yang dianggap rawan terhadap tindak kekerasan. Realitas sosiologis migrasi internasional merupakan salah satu hal yang jarang diperhatikan dalam aktivitas perburuhan. Padahal, kondisi di negara tujuan mengandung resiko sosial yang besar bagi pekerja perempuan. Mekanisme yang tidak jelas dan dasar hukum yang lemah menjadikan perlindungan terhadap BMP tidak maksimal. Oleh karena itu, kasus-kasus sensitif menyangkut tenaga kerja di luar negeri belum bisa diselesaikan.³⁹

BMP yang baru saja sampai di luar negeri sering kali mengalami *shock culture*. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan budaya pada dua negara, negara asal dan negara tujuan. BMP harus berjuang menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan. Lingkungan, situasi, dan kondisi tempat bekerja harus dipahami dengan baik oleh BMP. Membangun komunikasi yang baik merupakan salah satu langkah awal untuk menghindari berbagai benturan. Benturan budaya bisa memicu ketegangan yang berujung pada konflik antara majikan dan BMP.

Adanya berbagai benturan, seringkali memunculkan berbagai perlakuan tidak pantas yang diterima BMP di luar negeri. Larangan menunaikan ibadah merupakan salah satu contoh bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini banyak terjadi pada BMP yang bekerja pada majikan Cina. Seperti KY yang dilarang sholat oleh majikan sehingga harus diam-diam dalam beibadah. Selain larangan dalam beribadah, banyak terjadi kekerasan dalam bekerja terhadap para BMP. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, verbal, hingga seksual.

Kalau ingat majikan di Hong Kong tu kurang ajar banget. Kalau di depan istrinya itu dia sukanya mukulin aku, jadi aku sing *ditutuklahi*⁴⁰, di *tempongi*⁴¹, tapi kalau nggak ada istrinya dia nakal, godain, rangkul-rangkul, mau nyium. Makanya kalau kerjaan sudah selesai aku nggak berani di rumah, mesti aku pergi ke rumah simbahnya, nggak berani sendiri di rumah. Kalau dulu kan masih bodo ya, belum tahu apa-apa, kalau mau minta apa ya takut.⁴²

Majikan merasa menjadi orang yang paling berkuasa dan bisa

39 Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 63.

40 Dipukul.

41 Ditampar.

42 Wawancara AH salah satu mantan BMP Hong Kong yang mengalami kekerasan fisik dan seksual. Majikan menggoda ketika sang istri tidak ada dan menyiksa ketika dihadapan istrinya.

memperlakukan BMP sesukanya. Di sisi lain, BMP sebagai pihak dengan posisi sebagai pekerja tak dapat melakukan pembelaan apapun. Hal ini sering terjadi karena beberapa hal, seperti kesalahan komunikasi, kesalahan pemahaman dua belah pihak dan tidak adanya jaminan perlindungan bagi BMP yang membela diri.

Minimnya pemantauan kondisi BMP yang ada di luar negeri menimbulkan semakin banyaknya tekanan yang dirasakan. BMP dianggap sebagai seseorang yang tidak berharga. Benturan budaya yang dirasakan BMP juga merupakan penyulut konflik dalam pekerjaan. Akan tetapi, pengalaman pahit yang dialami oleh para BMP tidak memadamkan niat untuk kembali melakukan petualangan di luar negeri.

Posisi BMP dalam arus global tidak semuanya menunjukkan kesedihan, kebrutalan, dan eksploitasi. Ada pula fenomena yang menyentuh dan sarat akan humanisme. Benturan antar budaya dapat menjadi media positif dalam proses

konstruksi identitas. Sebagian dari pekerja domestik menyikapi berbagai pengalaman pahit mereka sebagai peristiwa yang traumatis. Namun ada beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa kehidupan yang mereka jalani di luar negeri merupakan pelajaran berharga dan menjadi konstruksi identitas mereka di masa yang akan datang.

RP merupakan seorang BMP purna Singapura yang mengaku bahwa dengan menjadi pekerja domestik dia bisa mendapatkan ilmu. Komunikasi sehari-hari yang menggunakan Bahasa Inggris membuatnya bisa dengan lancar berbicara dan dengan mudah memahami bahasa tersebut. Selama di Singapura, dia tidak dianggap sebagai asisten rumah tangga, akan tetapi dianggap sebagai keluarga. RP memiliki tugas menjaga anak, hampir setiap tahun sekali RP diajak majikan ke luar negeri seperti Thailand, Australia, dan Malaysia. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi RP. *"Kalau tidak kerja di Singapura, mana bisa jalan-jalan ke luar negeri."*

Lain halnya dengan RP, NI mantan BMP Brunei Darussalam mengaku bahwa dengan bekerja di non-rumah tangga memberikan kesan tersendiri dalam hidupnya. Jiwa kompetitif secara tidak langsung muncul ketika dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah Restoran India. Sebagai pramusaji, dia harus cekatan dalam melayani konsumen. NI belajar manajemen waktu untuk menghafal daftar menu beserta harga. Ketika NI salah menyampaikan pesanan dia akan ditegur oleh bagian juru masak dan harus membeli makanan tersebut. Pekerjaan tersebut membuat NI belajar disiplin dan menghargai waktu. Dia juga harus bisa membujuk konsumen untuk menambah menu atau sekedar

memberi uang tambahan/tip.

Kondisi BMP di luar negeri dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, kondisi buruk yang dialami oleh BMP. Kondisi buruk terjadi ketika BMP mengalami berbagai tekanan dan kekerasan. Ketidakmampuan BMP mengalami berbagai tekanan dan kekerasan. Ketidakmampuan BMP menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebudayaan yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya kesulitan beradaptasi dan berkomunikasi. *Kedua*, kondisi baik yang dialami BMP. Kondisi ini terjadi ketika BMP mampu *survive* dan menyesuaikan diri dengan baik. Selain itu, mereka juga menjalani prosedur dengan baik sehingga mendapat majikan yang baik. BMP dapat mengembangkan diri dari apa yang mereka jalani, seperti munculnya ketrampilan-ketrampilan tertentu (kemampuan bahasa asing, *soft skill*, dan manajemen diri).

Kepulangan BMP ke Indonesia

Kepulangan BMP terjadi ketika kontrak habis atau terjadi kasus. Pada masa kepulangan, BMP akan melewati terminal IV atau GPKTKI (Gedung Pendataan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia). Pro kontra mengenai urgensi terminal khusus buruh migran ini terjadi. Bagi pihak yang tidak setuju, mereka berasumsi bahwa tidak semua BMP yang telah pulang wajib keluar dari terminal tersebut. Gerbang kepulangan tersebut bertujuan untuk mempermudah pendataan BMP yang telah kembali ke Indonesia. Akan tetapi, pengupahan pembawa tas dan pemantauan penjemput tidak lantas menghapus pemerasan yang ada di terminal IV.⁴³

Sebenarnya setiap bandara itu beda, jadi aku pernah pulang lewat Solo, pernah lewat Jogja, Jakarta juga. Kalau di Jakarta kan memang lebih ribet ya, di situ langsung dihadang oleh petugas BNP2TKI langsung ada petugas apa, jadi kalau orangnya kaya TKI dia langsung ditodong menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebudayaan yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya kesulitan beradaptasi dan berkomunikasi. *Kedua*, kondisi baik yang dialami BMP. Kondisi ini terjadi ketika BMP mampu *survive* dan menyesuaikan diri dengan baik. Selain itu, mereka juga menjalani prosedur dengan baik sehingga mendapat majikan yang baik. BMP dapat mengembangkan diri dari apa yang mereka jalani, seperti munculnya ketrampilan-ketrampilan

43 Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 141.

tertentu (kemampuan bahasa asing, *soft skill*, dan manajemen diri).

Ketidakadilan yang dialami BMP ketika sampai di bandara tidak hanya sebatas pemerasaan berupa uang. Akan tetapi juga perlakuan yang diskriminatif dan kasar. Perbedaan terminal yang dikhususkan untuk BMP menjadi ladang yang subur bagi para calo, terutama penyedia jasa *travel* yang masih sering memaksa. Fenomena ketidakadilan terhadap BMP di bandara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam tahap penempatan dan perlindungan BMP masih berada pada aspek pembenahan hukum dan belum masuk pada proteksi sosial.

Sikap kritis tidak dipunyai oleh semua calon maupun mantan BMP yang bekerja di luar negeri. Berbagai kendala seperti rendahnya pendidikan BMP membuat mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak kebebasan berserikat dan memilih kebebasan bersikap, seperti untuk membayar atau tidak ketika melewati gerbang terminal IV. Selain minimnya pendidikan, pemberdayaan calon BMP untuk melek hukum dan informasi dari pemerintah juga masih tergolong minim. Seperti AP mantan BMP Taiwan yang merasakan rumitnya prosedur untuk melewati gerbang terminal IV. Banyak sekali alasan yang disampaikan petugas untuk mempersulit proses kepulangan. AP menuturkan bahwa keluarga yang menjemputnya sudah berada di luar gerbang, akan tetapi petugas bandaraterlalu bertele-tele.

Masalah sogok-menyogok petugas bandara juga tidak lantas membuat proses mulus. Pelayanan birokratis di bandara yang masih buruk dan kekerasan psikis (dibentak, diancam, dan sebagainya) juga masih membayangi BMP yang kembali dari luar negeri. Di sini pemerintah sudah seharusnya berbenah bagaimana sistem dan peraturan perlindungan terhadap BMP yang baik.

Kondisi BMP setelah Kembali ke Indonesia

Setelah kembali ke rumah, mantan BMP akan dihadapkan dengan realitas ekonomi yang berbeda. Ketika bekerja di luar negeri mereka bisa mendapatkan upah per bulan, di Indonesia mereka harus memutar otak untuk menyambung perekonomian. Mantan BMP tidak bisa mengandalkan uang hasil bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa tipe mantan BMP ketikakembali dari luar negeri, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Berencana kembali bekerja di luar negeri.

⁴⁴ Wawancara Dengan BD di Kantor Desa Lipursari pada Senin, 20 April 2015 pukul 12:22.

- b. Bekerja sebagai asisten rumah tangga di dalam negeri (Jakarta dan sekitarnya).
- c. Kembali pada aktivitas sebelum berangkat ke luar negeri (ibu rumah tangga, berkebun, dan bertani).
- d. Berdagang dengan membuka toko kelontong di rumah.
- e. Menganggur/ tidak bekerja.

Aktivitas ekonomi maupun sosial mantan BMP dalam masyarakat mengalami perubahan. Sepulangnya dari luar negeri, mereka mempunyai anggapan bahwa mereka mengalami kenaikan status sosial dengan apa yang mereka bawa dari luar negeri. Ada beberapa aspek yang dapat merubah kehidupan seseorang yang pulang dari luar negeri. Menurut BD⁴⁵ sebagai salah satu tokoh masyarakat, aspek tersebut antara lain:

Pertama, pola hidup yang mereka bawa dari luar negeri. Menurut penuturannya ada seorang mantan BMI yang baru saja pulang dari luar negeri selama empat tahun dengan membawa hasil sebesar 500 juta. Dalam kurun waktu empat tahun kemudian, orang tersebut merasa sudah tidak punya apa-apa karena uang yang diperoleh sudah habis. Hal ini tentu tidak terlepas dari pola dan gaya hidup yang cenderung konsumtif. *Kedua*, aspek kehidupan keluarga, hampir semua orang yang berangkat ke luar negeri telah berkeuarga. Dalam hal ini, ketika salah satu komponen keluarga tidak ada, hal tersebut memungkinkan terjadinya disfungsi keluarga. Ancaman akan kehancuran keluarga menjadi tantangan yang harus dihadapi para BMP. *Ketiga*, aspek lingkungan masyarakat. Lingkungan menjadi area yang tidak dapat dihindari ketika BMP kembali ke rumah. Lingkungan merupakan tempat kembali pada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum berangkat ke luar negeri. Sepulangnya BMP dari luar negeri seringkali membawa perubahan sikap terhadap lingkungan masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat pedesaan seringkali menyajikan warna tersendiri bagi orang yang hidup di dalamnya. Ada BMP yang terkadang merasa memiliki status lebih tinggi dibandingkan orang lain, sehingga menimbulkan rasa egois yang tinggi dan kesombongan dimata orang lain. Selain menimbulkan kecemburuan sosial, hal ini bisa menimbulkan dampak berupa konflik laten dalam masyarakat. Aktivitas perekonomian yang terhenti membuat mantan BMP harus mencari cara agar dapat bertahan hidup. Selain masalah pada

45 *Ibid.*, 2015.

kepulangan, mantan BMP juga memerlukan bekal berupa pelatihan dan pemberdayaan. Hal ini mengingat rendahnya pendidikan yang dimiliki BMP membuatnya sulit mengakses pekerjaan di daerah. Selain pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal dan pelatihan-pelatihan wirausaha, mantan BMP juga memerlukan pemberdayaan sosial yang meliputi pelatihan, penyuluhan, dan pemberian informasi mengenai politik, birokrasi, undang-undang, dan advokasi buruh.

Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari

Di Desa Lipursari ada beberapa pola pemberdayaan untuk BMP. Pola pemberdayaan yang diterapkan menurut J. Rothman harus memperhatikan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), yakni proses pembangunan, di mana generasi-generasi mendatang memperoleh modal (*capital*) sebanyak atau bahkan lebih dengan apa yang diterima oleh generasi sekarang. Bagi para pekerja dalam pengembangan masyarakat, modal yang perlu dijaga kesinambungannya dan harus dikembangkan adalah *natural capital* (modal alam), *physical capital* (modal fisik), *human capital* (modal manusia), dan *social capital* (modal sosial).⁴⁶

Dalam konteks yang luas, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pekerjaan kemasyarakatan secara umum berpijak pada tiga visi, yaitu menjawab tuntutan kemanusiaan, menjalankan upaya pengembangan masyarakat menuju terciptanya kondisi masyarakat yang bisa menolong diri sendiri (*self-help*), dan mengarahkan tahapan pengembangan masyarakat menuju tahapan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷ Dalam hal ini analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan melalui intervensi komunitas.

Intervensi Komunitas digambarkan oleh Rothman (1995) sebagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan melalui beberapa model (pendekatan) intervensi, seperti pengembangan masyarakat lokal, perencanaan, dan kebijakan sosial. Dari ketiga model intervensi tersebut, proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat konsensus seperti pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial (*social planning policy*), ataupun pendekatan aksi sosial (*social action*).⁴⁸

46 Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas; Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 78.

47 *Ibid.*, hlm. 80.

48 *Ibid.*, hlm. 120.

A. Pengembangan Masyarakat Lokal (*locality development*)

Pendekatan pembangunan kedaerahan (*locality development approach*) menyatakan bahwa perubahan komunitas bisa terjadi melalui partisipasi yang luas dari berbagai spektrum masyarakat tingkat lokal dalam menentukan tujuan dan aksi, sedangkan komunitas dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, mengintegrasikan masyarakat, dan membantu masyarakat lebih mandiri, sehingga mampu menyelesaikan masalah.

Penerapan pendekatan ini dalam strateginya melibatkan seluruh anggota komunitas untuk mencapai konsensus melalui komunikasi dan diskusi. Dalam hal ini praktisi merupakan aktor yang menjalankan pengembangan masyarakat dan berperan sebagai katalisator atau tainer. Praktisi sebagai katalisator mendorong pembentukan kelompok kerja untuk mencari penyelesaian masalah.⁴⁹ BMP purna di Desa Lipursari melakukan pengembangan secara lokal dengan beberapa proses. Proses tersebut dapat dikategorikan melalui beberapa cara, seperti pengembangan individu untuk individu, komunitas untuk individu, dan komunitas untuk kelompok.

1. Individu untuk Individu

Individu untuk individu merupakan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh individu dan untuk individu. Pengembangan melalui individu dilakukan BMP dengan beberapa alternatif. Kondisi perekonomian yang kembali sulit membuat para mantan BMP harus bisa mencari cara/alternatif ekonomi untuk pemasukan keluarga. Cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan memanfaatkan remiten yang didapat sebagai modal usaha.

Kondisi geografis Desa Lipursari yang merupakan wilayah pedesaan membuat akses ekonomi masyarakat terbatas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap berbagai usaha yang dilakukan oleh mantan BMP. Usaha yang dilakukan individu antara lain seperti membuka toko kelontong, dagang, hingga membuat kerajinan. SH merupakan salah satu BMP yang mencoba peruntungan dengan berdagang. Akan tetapi menurut penuturannya, semua usaha yang pernah dia coba tidak ada yang bisa menutup kebutuhan ekonomi.

ML merasa tidak jauh berbeda dengan SH, pemasaran di Desa

⁴⁹ J. Rothman, dkk, *Strategies of Community Intervention*, (Itasca: F.E Peacock Publisher, 2001), hlm. 29.

Lipursari masih relatif susah untuk memulai usaha. Dia mengatakan sudah mencoba beberapa usaha, akan tetapi hasilnya gagal. SR mengalami nasib yang hampir sama dengan SH dan ML, kesulitan akses ekonomi di Desa Lipursari membuatnya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. SR memilih untuk berjualan jajanan di Sekolah Dasar Desa Lipursari. Selain itu, dia mengisi waktu luang dengan membuat bulu mata yang nantinya disetorkan kepada pedagang dari Banjarnegara.

2. Komunitas untuk Individu

Komunitas untuk individu merupakan pengembangan masyarakat dari komunitas lokal yang ditujukan untuk individu. Komunitas lokal mempunyai andil yang cukup signifikan dalam proses pemberdayaan. Komunitas lokal dijadikan sebagai wadah dan alat untuk menyampaikan pemikiran para BMP. Salah satu komunitas lokal di Desa Lipursari adalah Istana Rumbia. Komunitas yang berawal dari sebuah Taman Baca Masyarakat (TBM) ini mengembangkan kiprahnya dalam memberdayakan mantan BMP sejak tahun 2006. Komunitas dengan slogan "*Datang Tersenyum, Pulang Membawa Ilmu*" mendapat akta notaris dengan No. 165/12 September 2013. Istana Rumbia beranggotakan sepuluh pengurus yang semuanya merupakan *volunter*.

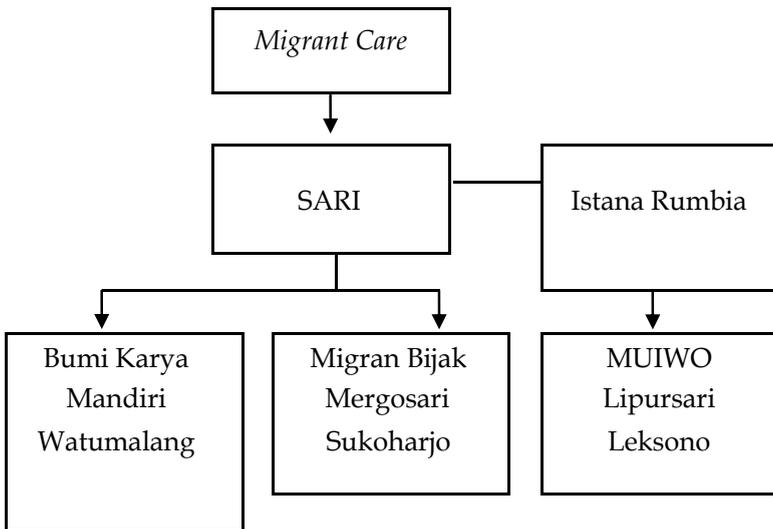
Pemberdayaan yang ada diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Adapun pemberdayaan untuk mantan BMP, Istana Rumbia berperan sebagai jembatan dalam menyampaikan kebutuhan pelatihan. BMP di Desa Lipursari bisa menyampaikan kepada pihak Istana Rumbia ketika membutuhkan pelatihan tertentu seperti menjahit, rias pengantin, hingga bordir. Keberadaan komunitas berfungsi sebagai penyampai kepada pemerintah untuk merealisasikan pelatihan yang diminta.

AH dan YD merupakan salah satu mantan BMP yang mendapat pelatihan rias pengantin dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setelah mengikuti pelatihan, mereka mendirikan sebuah salon rias pengantin di rumah. Usaha yang dijalankan YD hanya berkembang di Desa Lipursari. Hal tersebut dikarenakan modal yang terbatas sehingga usahanya sulit berkembang. Berbeda dengan YD, AH mengembangkan usaha salon dan rias pengantin lebih jauh. Selain membuka salon, AH juga menjadi tenaga pengajar tata rias di Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) di Kabupaten Wonosobo. Lembaga tersebut antara lain seperti Kinanthi, INKA, dan Excelent.

3. Komunitas Untuk Kelompok

Komunitas untuk kelompok merupakan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas untuk kelompok yang lebih kecil. Partisipasi pemberdayaan lokal yang lebih luas bagi mantan BMP mendapat dukungan dari beberapa pihak. Salah satu pihak yang ikut memberi perhatian adalah organisasi skala nasional *Migrant Care*. Melalui program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) *Migrant Care* menggandeng salah satu LSM dari Solo untuk memberdayakan mantan BMP di Kabupaten Wonosobo. Di Wonosobo SARI (*Social Analysis and Research Institute*) membentuk beberapa organisasi lokal. Organisasi tersebut diantaranya adalah Bumi Karya Mandiri di Desa Kuripan Watumalang, Migran Bijak Mergosari di Desa Mergosari Sukoharjo, dan MUIWO (*Migran United Indonesia Wonosobo*) yang berada di Desa Lipursari.⁵⁰

Gambar 1. Bagan Komunitas Buruh Migran Perempuan



Organisasi-organisasi tersebut dibentuk oleh SARI untuk mewa-dahi dan memberdayakan BMP. Pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan wirausaha serta pemberdayaan sosial seperti training menulis dan sosialisasi untuk advokasi BMP. MUIWO sendiri merupakan komunitas buruh migran di bawah binaan Istana Rumbia dan SARI. Sebagai organisasi

⁵⁰ Hasil wawancara dengan MBN dan RP di Desa Lipursari pada April 2015.

mantan BMP, MUIWO berperan terhadap pemberdayaan. Kelompok organisasi yang berdiri pada Desember 2014 ini memiliki agenda rutin setiap bulan. Kegiatan yang berlangsung tidak terlepas dari LSM SARI sebagai fasilitator. SARI pada tahap berikutnya akan membantu mantan BMP melalui MUIWO untuk menjadi berdaya.

B. Pendekatan Perencanaan Sosial (*Social Planning Approach*)

Pendekatan perencanaan sosial (*social planning approach*) berusaha memanfaatkan proses teknis dalam mengatasi masalah sosial (termasuk kemiskinan, perumahan, kesehatan, dan lainnya) melalui perubahan terencana berdasarkan hasil penelitian dan perencanaan yang rasional. Dalam hal ini, praktisi berperan sebagai *planner* atau peneliti yang memberikan bantuannya setelah melakukan riset atau penelitian dalam hal menentukan prioritas masalah serta dalam hal menemukan kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁵¹

SARI dalam perkembangan dan pemberdayaan mantan BMP di Desa Lipursari berperan sebagai *planner* yang memberi bantuan setelah melakukan riset dalam menentukan prioritas masalah dalam masyarakat. SARI melalui MUIWO memberikan arahan berupa perencanaan-perencanaan kegiatan yang harus memiliki target, terutama bagi anggota MUIWO.⁵² Target dari pemberdayaan mantan BMP di Desa Lipursari tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, akan tetapi juga merambah pada bidang sosial.

Medium yang dipakai dalam pendekatan ini adalah organisasi formal yang dibentuk untuk menelaah data. Sedangkan kaitannya dengan kekuasaan, masyarakat melihat kekuasaan sebagai “majikan” dan “sponsor” yang bukan bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga akan ada perbedaan kepentingan atau konflik di dalam masyarakat tersebut tidak hanya di antara masyarakat itu sendiri, tapi juga masyarakat dengan kekuasaan.

SARI dan MUIWO kemudian sebagai organisasi formal yang berperan menjadi praktisi, mencoba mencapai konsensus demi kepentingan bersama. Walaupun hal tersebut terkadang harus melalui konflik terlebih dahulu. Mantan BMP di Desa Lipursari tidak semua bisa dengan mudah dikoordinasi. Dari sekitar 65 jumlah mantan BMP yang tercatat, hanya 25 orang yang bersedia menjadi anggota dan 10

⁵¹ J. Rothman, dkk, *Strategies of Community Intervention*, (Itasca: F.E Peacock Publisher, 2001), hlm. 31.

⁵² Wawancara AH sebagai salah satu BMP aktivis SARI di Desa Lipursari, pada Minggu 26 April 2015 pukul 11:31.

yang aktif di MUIWO. Mantan BMP yang tidak bersedia memiliki alasan diplomatis mengenai kekhawatiran akan diperdaya dan kesibukan ekonomi.⁵³

Dalam pendekatan perencanaan, organisasi atau komunitas harus memiliki target dan tujuan yang jelas. MUIWO memberikan paparan mengenai program yang akan dijalankan, seperti target pelatihan dan target kegiatan lainnya. Pendekatan ini direspon dengan positif oleh anggota MUIWO. Menurut mereka, perencanaan yang dilakukan oleh MUIWO memberikan harapan akan perbaikan keadaan di masa depan. SL salah satu mantan BMP mengatakan bahwa dengan perencanaan yang telah dibuat oleh MUIWO dia merasa memiliki masa depan yang lebih baik. *“Buat masa depan saya ya ada peluang buat cari tambahan, daripada di rumah nggak ada kegiatan, kan bisa tambah pengalaman dengan saling bercerita.”*

C. Pendekatan Aksi Sosial (*Social Action Approach*)

Pendekatan aksi sosial (*social action approach*) didasarkan pada anggapan bahwa kelompok populasi perlu diorganisasi agar beraliansi dengan masyarakat lain yang lebih maju. Tujuan pendekatan ini adalah mendorong terjadinya respons dari komunitas yang lebih besar untuk meningkatkan sumber daya atau perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Dengan kata lain kegiatan pengembangan masyarakat mencoba meningkatkan posisi tawar dari kelompok atau populasi yang marjinal dalam akses atau pemanfaatan sumber daya alam melalui perubahan institusi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara lebih baik.⁵⁴

Mantan buruh migran di Desa Lipursari memiliki MUIWO sebagai wadah untuk memberdayakan diri. MUIWO seperti yang sudah disinggung pada bahasan sebelumnya, memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemberdayaan. MUIWO melakukan pendekatan dengan aksi sosial yang cukup efektif. Setiap bulan, setidaknya satu kali anggota komunitas dikumpulkan untuk membahas rencana yang akan dilakukan dikemudian hari. Hal ini merupakan salah satu langkah sebagai aksi dalam menggerakkan mantan BMP untuk berdaya. Desa Lipursari melalui komunitas di dalamnya memiliki dua macam bentuk

53 Hasil wawancara dengan RP sebagai ketua MUIWO mengatakan, pada pendataan awal mantan BMP di Desa Lipursari menunjukkan banyak dari mereka yang enggan didata karena takut apa yang mereka sampaikan akan dijual atau dimanfaatkan untuk kepentingan personal.

54 J. Rothman, dkk, *Strategies of Community Intervention*, (Itasca: F.E Peacock Publisher, 2001) hlm. 33.

model pemberdayaan menggunakan pendekatan aksi sosial.

1. Pemberdayaan Ekonomi Mantan BMP

Dalam pemberdayaan ekonomi, aksi yang dilakukan MUIWO adalah melakukan pertemuan untuk membahas berbagai kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, anggota MUIWO diarahkan untuk berdiskusi mengenai rencana pengembangan ekonomi. Dari diskusi yang telah dilakukan akan muncul gagasan-gagasan yang nantinya bisa dijadikan sebagai ide pada kegiatan selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang telah didiskusikan sejauh ini meliputi pelatihan dan kursus. Agenda yang dimiliki oleh MUIWO adalah pelatihan pembuatan manisan sari buah salak (*salak in syrup*) dan batik tradisional Wonosobo.

2. Pemberdayaan Sosial Mantan BMP

Aspek sosial menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan mantan BMP. Pemberdayaan sosial yang dilakukan meliputi bimbingan dengan diskusi aktif mengenai hukum, perundang-undangan, hingga *skill* advokasi bagi BMP. Pada tahap ini komunitas berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan mantan BMP. Dalam pemberdayaan sosial mantan BMP, MUIWO dibantu oleh SARI memberikan berbagai pengarahan. Pengarahan yang disampaikan meliputi bagaimana komunitas tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan diri bagi mantan BMP dan advokasi bagi BMP yang ada di luar negeri.

Aksi yang telah dilaksanakan oleh MUIWO dalam pemberdayaan sosial diantaranya adalah melalui kegiatan rutin pertemuan komunitas. Dalam kegiatan ini, mantan BMP bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan anggota yang lain. Mantan BMP secara tidak langsung bisa berlatih untuk berani bersosialisasi dan menunjukkan eksistensi diri. Selanjutnya, MUIWO mewadahi mantan BMP untuk belajar menulis. Pada salah satu pertemuan, dengan bantuan SARI anggota MUIWO memperoleh materi tentang menulis. Mereka diarahkan untuk menuliskan *Most Significant Change*⁵⁵ yang dialami oleh mantan BMP setelah pulang dari luar negeri dan mengikuti organisasi MUIWO.⁵⁶

55 Perubahan yang Bermakna.

56 Pertemuan anggota MUIWO di rumah SH, salah satu mantan BMP Dusun Dampit, Desa Lipursari pada Jum'at 17 April 2015.

Penutup

Pemberdayaan mantan BMP melalui intervensi komunitas memberikan implikasi positif-aktif terhadap aktor di dalamnya. Pemberdayaan mantan BMP di Desa Lipursari dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Dari ketiga pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang terjadi meliputi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang melibatkan individu untuk individu, komunitas untuk individu, dan komunitas untuk kelompok.

Pada proses pemberdayaan, untuk mencapai tujuan dibutuhkan sinergi antara mantan BMP, komunitas/organisasi, (*Migrant Care*, SARI, MUIWO, dan Istana Rumbia) serta pemerintah yang meliputi dinas terkait. Pemberdayaan ekonomi yang diterima berupa rencana usaha dan berbagai pelatihan (kursus menjahit, tata rias pengantin, salon, bordir, dan pembuatan makanan kecil) yang diperuntukkan bagi mantan BMP. Sedangkan pemberdayaan sosial yang diterima berupa advokasi dan pengembangan diri mantan BMP. Penelitian ini menemukan beberapa hal terkait dengan pemberdayaan melalui intervensi komunitas.

Pertama, pemberdayaan bagi mantan BMP di Desa Lipursari dapat dilakukan oleh individu secara subsisten dan komunitas secara kontinyu. Artinya pemberdayaan mantan BMP tidak terpaku pada komunitas tertentu selama aktor yang bersangkutan memiliki keinginan untuk berubah secara mandiri. Karena pada dasarnya pemberdayaan merupakan proses masyarakat dari tidak berdaya menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Kedua, komunitas seperti LSM dan organisasi lokal merupakan wadah yang dapat menyalurkan gagasan dan pemikiran mantan BMP. Melalui komunitas, BMP mendapat akses pemberdayaan dalam arti yang lebih luas. Komunitas merupakan wahana yang secara aktif menampung, menjebatani, dan mengarahkan pemberdayaan yang ditujukan bagi mantan BMP. Selain itu, komunitas merupakan tempat bagi para mantan BMP dalam menempa diri menuju pribadi yang lebih aktif dan produktif.

Ketiga, komunitas menghubungkan aktor (mantan BMP) dengan pihak pada dimensi yang lebih luas, seperti pemerintah daerah. Pemberdayaan yang berlangsung tidak dapat terlepas dari berbagai pihak yang bersinergi dengan baik. Pemerintah juga memerlukan intervensi komunitas dalam proses pemberdayaan mantan BMP baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam aspek ekonomi, pemerintah

memiliki program-program pemberdayaan melalui berbagai kursus dan pelatihan wirausaha. Sedangkan dalam aspek sosial pemerintah memerlukan intervensi komunitas untuk berkoordinasi dengan mantan BMP. Pemberdayaan sosial yang terwujud berupa penyuluhan mengenai kebijakan pemerintah, advokasi, hingga pengembangan kualitas diri.

Keempat, komunitas mengarahkan BMP untuk menyusun perencanaan bersama untuk memulai sebuah aksi. Aksi pemberdayaan dilakukan ketika koordinasi dari berbagai pihak telah siap. Dengan adanya intervensi komunitas, dapat disimpulkan bahwa mantan BMP memiliki harapan untuk menjadi berdaya. Berdaya di sini tidak hanya dari segi perekonomian saja, akan tetapi juga dari segi sosial. Melalui intervensi dari komunitas, mantan BMP menjadi paham akan konsep-konsep migrasi internasional serta dampak yang akan ditimbulkan. Mantan BMP setidaknya memiliki tujuan dalam kehidupan mereka setelah kembali ke Desa Lipursari. Intervensi komunitas juga menjadi wahana bagi mantan BMP untuk memasuki area publik. Mereka mulai dilibatkan dalam beberapa pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam perlindungan dan pemberdayaan BMP. Partisipasi aktif dari BMP serta berbagai komunitas yang *concern* di bidang BMP masih sangat diperlukan, khususnya dalam penyusunan kebijakan perlindungan terhadap buruh migran. Namun, membangun partisipasi aktif BMP perlu adanya langkah pemberdayaan terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan antara lain seperti koordinasi yang lebih terstruktur dari beberapa pihak.

Pemberdayaan seharusnya dilakukan jauh sebelum para BMP berangkat ke luar negeri. Kaum perempuan harus diberi pemahaman yang mendalam mengenai segala hal yang berhubungan dengan migrasi internasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pendidikan politik bagi BMP. Hal ini dimaksudkan agar BMP memahami dan melek bagaimana perpolitikan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pemberdayaan BMP yang terencana dan terkoordinasi sejak pra pemberangkatan dapat membangun

kualitas BMP yang kritis, cerdas, dan melek informasi mengenai hukum. Dengan demikian, mereka mempunyai kapasitas untuk dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan BMP.

Pemerintah seharusnya memiliki andil yang cukup intensif dalam pemberdayaan BMP. Adanya perhatian dari tingkat yang

paling kecil seperti pemerintah desa akan memberikan dampak yang besar bagi BMP. Pemerintah pada level desa di Desa Lipursari perlu memberikan perhatian yang sedikit lebih besar kepada BMP. Dengan administrasi dan pencatatan yang jelas, akan menjadikan BMP merasa diakui dan dilindungi keberadaannya. Dalam pemberdayaan ekonomi, pemerintah desa juga harus lebih banyak berkoordinasi dengan level pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan, dapat berjalan dan memiliki tidak lanjut.

Pembedayaan melalui intervensi komunitas setelah kepulungan BMP juga memiliki peran yang penting. Adanya intervensi komunitas memberikan bantuan yang cukup banyak dalam proses pemberdayaan. Organisasi mantan BMP sudah memulai langkah yang cukup baik dengan berbagai perencanaan dan aksi yang dilakukan. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut memerlukan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi agar mantan BMP dapat melangkah dengan pasti. Selain dari organisasi yang ada, koordinasi secara berkelanjutan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah baik level desa maupun kabupaten, serta buruh migran perempuan sendiri sebagai aktor pelaku dan penerima pemberdayaan

Daftar Bacaan

BUKU

- Abdullah, Irawan, 2002, *Studi Mobilitas Penduduk: Antara Masa Lalu dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Adams, Robert, 2003, *Social Work and Empowerment*, New York: Palgrave Macmillan.
- Adi, Isbandi Rikminto, 2008, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qardawy, Stekh Muhammad Yusuf, 1996, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Asy'arie, Musa, 1997, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI.
- Azmy, Ana Sabhana, 2010, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.

- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan, 1989, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Clark, John, 1995, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Special For Woman*, Bandung: Syamil Al-Qur'an.
- Haris, Abdul, 2005, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Sa'ad, 2007, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, Malang: UIN Malang Press.
- Irianto, Sulistyowati, 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Machendrawati, Nanih, dkk., 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya.
- Moeleong, Lexy J., 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Pitoyo, Agus Joko, 2004, *Buruh Migran di Luar Negeri: Perempuan-perempuan Perkasa*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Raharjo, 2010, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, Muhtadi, 2012, *Geliat Ekonomi Islam: Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang: UIN Maliki Press.
- Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rothman, J., dkk, 2001, *Strategies of Community Intervention*, Itasca: F.E Peacock Publisher.
- Safitri, Salma dkk, 2010, *Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia: Catatan Penanganan Buruh Migran Perempuan Pekerja rumah tangga (BMP-PRT) Solidaritas Perempuan 2005-2009*, Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Singarimbun, Masri, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soetrisno, Loekman, 1997, *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Tagaroa, Rusdi, dan Encop Sofia, *Buruh Migran Indonesia Mencari*

- Keadilan*, Jakarta: Solidaritas Perempuan.
- Usmara, 2006, *Motivasi Kerja: Proses Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Amara Books.
- Young, Iris, 2006, *Beyond the Unhappy Marriage: A Critique of the Dual System Theory Dalam Rosemarie Tong, Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

JURNAL, SKRIPSI, THESIS DAN DESERTASI

- Budijanto, 2010, *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung*, Malang: Desertasi Program Studi Sosiologi Pedesaan Universitas Brawijaya.
- Dewayanti, Ratih, 2010, *Penguasaan Tanah, Migrasi Internasional, dan Perubahan Pedesaan*, *Jurnal Analisa Sosial* Vol. 15 No. 2, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Jaya, Nenet Natasudin, 2014, *Model Kewirausahaan dan Pemberdayaan Buruh Migran (TKI) di Lombok Barat-NTB*, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 08 No. 02, Mataram: Universitas Mahasaraswati, 2014.
- Muryanti, 2010, *Social Security di Desa Sebagai Penopang Pekerjaan Buruh Migran Perempuan*, *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 15 No. 2, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Noerhadi, Toeti Herayati, 1989, *Bagaimana Mengatasi Kodrat*, *Jurnal Pesantren* No. 2 Vol. VI.
- Subianto, Anwar, 2006, *Pengaruh Pemanfaatan Remitan Buruh Migran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap*, Semarang: Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Wulan, Tyas Retno, 2010, *Pengetahuan dan Kekuasaan: Penguatan Remiten Sosial Sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran*, Bogor: Desertasi Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor.

INTERNET

- Fadjri, *Studi Pola Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna*, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, <http://naker.go.id/id/news/2015/01/26/studi-pola-pembinaan-tenaga-kerja-indonesia-tki-purna>, diakses pada 25 Maret 2015.
- Hadi, S. Djatmiko, 2014, *Potret TKI dari Wonosobo*, <http://>

www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/03/257572/Potret-TKI-dari-Wonosobo, diakses pada 26 Januari 2015.

Hardi, Eja Armaz, 2013, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan*, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/article/view/103/98>, diakses pada 9 Juni 2015

Harian Suara Merdeka 20 Januari 2015, *Lindungi TKI Perlu Dimulai dari Desa*, <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/lindunggggi-tki-perlu-dimulai-dari-desa/>, diakses pada 09 Maret 2015

Rmol 18 Januari 2013, *Pemerintah Patut Berdayakan Hasrat Ingin Berubah dari TKI*, <http://www.rmol.co/read/2013/01/18/94595/Pemerintah-Patut-Berdayakan-Hasrat-Ingin-Berubah-dari-TKI->, diakses pada 09 Maret 2013

Wybisana, Goenawan, 2009, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, <http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=3639>, diakses pada 15 Mei 2015.

Yuniarso, Agus, 2012, *Merti Desa: Ungkapan Syukur Kaya Makna*, (<http://kabaremagazine.com/2012/10/merti-desa-ungkapan-syukur-kaya-makna/>), diakses pada kamis 4 Juni 2014.

DOKUMEN

Asian Migran Care (AMC), 2007, *Underpayment2: Pemerasan Sistematis berkepanjangan Pada Buruh Migran Indonesia di Hong Kong*, Jakarta: ILO.

Biro Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo tahun 2014.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo tahun 2014.

ILO, 2010, *Decent Work For Domestik*.

International Organization for Migration (IOM), 2010, *Final Report: Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, Jakarta: IOM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun Anggaran 2014 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Profil Desa Lipursari Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016: BAPEDA Wonosobo 2015.

